

---

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2023

Putri Alya Nur<sup>1\*)</sup>; Patta Tope<sup>2)</sup>; Yunus Sading<sup>3)</sup>

<sup>1 2 3</sup> Program Studi Magister Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

\*Corresponding email: [putrialyanurr@gmail.com](mailto:putrialyanurr@gmail.com)

---

### *Abstract*

*This study aims to analyze the regional financial performance in terms of revenue variance, fiscal decentralization, financial independence, effectiveness, and efficiency of regional finance, as well as to examine the influence of financial performance on the economic growth rate in Central Sulawesi Province for the period 2016–2023. A quantitative approach was employed, using two methods of analysis: descriptive analysis based on financial ratios to evaluate regional financial performance, and log-log regression analysis to measure the elasticity of the influence of financial performance variables on economic growth. The results show that during the 2016–2023 period: (1) Regional financial performance, based on revenue variance analysis, generally met the established criteria, with revenue realization tending to exceed the budget. The fiscal decentralization ratio fell into the medium category, while the level of financial independence was relatively low, indicating a high dependency on the central government in an instructive relationship pattern. The effectiveness ratio of locally generated revenue (PAD) demonstrated a highly effective performance; however, the efficiency ratio of financial management was still relatively low. (2) The regression analysis results indicated that the financial independence ratio, PAD effectiveness, and financial efficiency did not have a significant influence on regional economic growth. These findings suggest that although the effectiveness of regional financial management is good, the low level of independence and suboptimal efficiency remain obstacles to promoting economic growth. Additionally, economic growth in Central Sulawesi Province is more heavily influenced by private sector activities and the dominance of the mining sector.*

**Keyword:** Financial, Fiscal, Decentralization, Financial Independence, PAD

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Dengan kondisi geografis tersebut, pengelolaan pemerintahan secara terpusat menjadi tidak efektif. Untuk itu, pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pemerintah Indonesia, 2014).

Bastian (2018), Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah, berbagai rasio keuangan digunakan, antara lain rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, tingkat desentralisasi fiskal, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio-rasio ini menjadi alat evaluasi penting untuk melihat sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi

anggaran diarahkan untuk mendukung operasional pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembiayaan program-program pembangunan daerah. Efektivitas pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi belanja mengukur sejauh mana penggunaan anggaran menghasilkan output yang optimal. Tingkat desentralisasi fiskal memperlihatkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan secara mandiri melalui pendapatan sendiri, sementara rasio kemandirian keuangan menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat (Sustrisno, 2019).

Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2016–2023 mencatatkan surplus anggaran setiap tahunnya, yang menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja yang positif. Namun, surplus tersebut mengalami fluktuasi dan menunjukkan tren penurunan nilai surplus dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keberhasilan mempertahankan surplus anggaran dapat dianggap sebagai indikator pengelolaan fiskal yang baik, dalam perspektif ekonomi Keynesian, surplus anggaran yang berkelanjutan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi apabila belanja daerah tidak dioptimalkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mendorong peningkatan permintaan agregat.

Oleh karena itu, surplus anggaran yang terus-menerus tidak serta-merta menunjukkan kinerja ekonomi yang optimal, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja keuangan daerah, dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi, desentralisasi fiskal, dan kemandirian, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, desentralisasi fiskal, dan kemandirian keuangan selama tahun 2016–2023, dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016-2023

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana analisis data berupa angka-angka atau statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2023. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) analisis yang akan dilakukan. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu menganalisis Deskriptif dengan rasio keuangan, Analisis Varians Pendapatan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2016).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Analisis Varians Pendapatan Daerah**

Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Hasil perhitungan Analisis Varians Pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

**Tabel 1. Analisis Varians Pendapatan**

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Varians /Selisih (Rp)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

				-	
2016	3.175.692.919.654,0	7	3.283.080.357.922,00	107.387.438.267,9	3 Unfavorable
2017	3.638.342.669.181,5	4	3.699.084.813.690,00	60.742.144.508,46	- Unfavorable
2018	3.881.148.079.297,1	7	3.831.056.066.096,00	50.092.013.201,17	Favourable
2019	4.128.153.120.869,7	8	4.170.517.779.691,15	42.364.658.821,37	- Unfavorable
2020	4.193.329.057.130,0	7	4.106.116.585.244,95	87.212.471.885,12	368.003.274.353,8 Favourable
2021	4.695.680.785.591,8	0	4.327.677.511.238,00	161.482.341.539,4	0 Favourable
2022	4.895.740.491.702,4	5	4.734.258.150.163,00	206.817.200.202,8	5 Favourable
2023	5.078.850.918.733,8	4	4.872.033.718.531,00		4 Favourable

Berdasarkan Tabel 1. realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016, 2017, dan 2019 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kinerja pendapatan tersebut masuk dalam kategori Unfavorable. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum tercapai dengan optimal pada tahun-tahun tersebut, yang berimplikasi pada kurangnya efektivitas pengelolaan pendapatan. Namun, pada tahun 2018 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi pendapatan yang lebih besar dari pada anggaran yang ditetapkan, yang mengindikasikan kinerja pendapatan yang lebih Favorable. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawsi Tengah.

## 2. Derajat Desentralisi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah untuk melihat seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	939.092.069.082,07	3.175.692.919.654,07	29,57%	Sedang
2017	958.212.001.717,54	3.638.342.669.181,54	26,34%	Sedang
2018	1.016.628.663.677,00	3.881.148.079.297,17	26,19%	Sedang
2019	1.090.854.785.057,78	4.128.153.120.869,78	26,42%	Sedang
2020	1.122.670.398.589,07	4.193.329.057.130,07	26,77%	Sedang
2021	1.494.246.273.498,51	4.695.680.785.591,80	31,82%	Cukup
2022	1.559.706.290.296,45	4.895.740.491.702,45	31,86%	Cukup
2023	1.719.377.774.539,84	5.078.850.918.733,84	33,85%	Cukup
<b>Rata-rata</b>			<b>29,10%</b>	<b>Sedang</b>

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pemerintah Sulawesi Tengah pada Tahun 2016-2023 mengalami angka

yang fluktuatif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sedang dengan rata-rata rasio sebesar 29,10 persen atau masih berada pada tahap skala interval 20,01-30,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal secara optimal masih terbatas, yang mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pengembangan potensi lokal.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan transfer yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Rasio	Kinerja	Pola Hubungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	939.092.069.082,07	2.215.604.520.193,00	42,39%	Rendah	Instruktif
2017	958.212.001.717,54	2.654.741.314.195,00	36,09%	Rendah	Instruktif
2018	1.016.628.663.677,00	2.731.430.163.822,00	37,22%	Rendah	Instruktif
2019	1.090.854.785.057,78	3.014.996.800.097,00	36,18%	Rendah	Instruktif
2020	1.122.670.398.589,07	3.055.555.418.224,00	36,74%	Rendah	Instruktif
2021	1.494.246.273.498,51	3.149.096.842.573,00	47,45%	Rendah	Instruktif
2022	1.559.706.290.296,45	3.319.202.639.678,00	46,99%	Rendah	Instruktif
2023	1.719.377.774.539,84	3.353.805.838.833,00	51,27%	Sedang	Konsultatif
<b>Rata-rata</b>			<b>41,79%</b>	<b>Rendah</b>	<b>Instruktif</b>

Berdasarkan standar penilaian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat kemandirian yang rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dimana peranan pemerintah lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rendahnya rasio kemandirian disebabkan karena PAD Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah jika di dibandingkan dengan pendapatan transfer. Rendahnya tingkat kemandirian daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan berdampak pada tingkat pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena PAD Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat diandalkan melayani masyarakatnya dan masih bergantung pada pendapatan transfer

### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) di ukur dengan rasio antara output dengan input yaitu menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil tingkat rasio efisiensi maka tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	2.799.561.415.197,24	3.175.692.919.654,07	88,16%	Cukup Efisien
2017	3.030.466.612.593,82	3.638.342.669.181,54	83,29%	Cukup Efisien

2018	3.628.013.037.630,17	3.881.148.079.297,17	93,48%	Kurang Efisien
2019	4.098.771.219.451,17	4.128.153.120.869,78	99,29%	Kurang Efisien
2020	3.810.416.446.556,90	4.193.329.057.130,07	90,87%	Kurang Efisien
2021	4.339.507.807.931,43	4.695.680.785.591,80	92,41%	Kurang Efisien
2022	4.825.333.666.427,41	4.895.740.491.702,45	98,56%	Kurang Efisien
2023	5.026.524.230.707,43	5.078.850.918.733,84	98,97%	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>93,13%</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Sulawesi Tengah pada Tahun 2016-2017 hasilnya cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80-90 persen. Sedangkan pada Tahun 2018-2023 hasilnya menunjukkan kurang efisien karena nilai rasio efisiensi mencapai 90-100 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pelaksanaan program, sehingga efektivitas penggunaan anggaran menjadi tidak maksimal.

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dengan menggunakan tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10,00 dan nilai tolerance lebih dari 0,10.

**Tabel 5 Uji Multikolinearitas  
Coefficientsa**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kemandirian Daerah	0.769	1.300
Efektivitas PAD	0.919	1.088
Efisiensi Keuangan Daerah	0.808	1.238

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sebab semua angka VIF yang dihasilkan masing-masing variabel memiliki nilai di bawah 10,00 dan tolerance diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas, sehingga persamaan layak digunakan.

### 2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji glejser heteroskedastisitas merupakan satu diantara metode statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi data dari gejala heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap varian data penelitian (variabel independen).

**Tabel 6 Hasi Uji Heteroskedastisitas Glejser Correlationsa**

Model	Sig.
1 (Constant)	0.022
Kemandirian	0.795
Efektivitas PAD	0.056
Efisiensi Keuangan Daerah	0.070

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 6 untuk variabel kemandirian daerah, variabel efektivitas PAD, dan variabel efisiensi keuangan daerah, menunjukkan bahwa semua nilai probalitas variabel atau sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel

penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan dapat dianalisis lebih lanjut dengan uji kelayakan model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi.

**Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi**

Unstandardized Residual	
Test Value <sup>a</sup>	.04813
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	6
Z	0.382
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.703

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7 diketahui nilai signifikannya sebesar 0.703 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

### 4. Regersi Log-Log

Analisis regresi log-log digunakan untuk mengukur elastisitas, yaitu sejauh mana persentase perubahan variabel independen (kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah) memengaruhi persentase perubahan variabel dependen (laju pertumbuhan ekonomi).

**Tabel 8 Analisis Regresi Log-Log Coefficientsa**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.929	39.831		0.726	0.508
	Kemandirian	1.862	3.232	0.292	0.576	0.595
	Efektivitas PAD	-3.248	4.747	-.317	-.684	0.531
	Efisiensi	-4.018	7.225	-.275	-.556	0.608

Hasil koefisien-koefisien pada persamaan tersebut dapat dijelaskan Nilai konstanta (a) sebesar 28,93 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen yang berpengaruh ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ ,  $X_3=0$ ), maka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 28,93. Koefisien kemandirian daerah sebesar 1,9, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam rasio kemandirian keuangan daerah diperkirakan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 %. Karena nilainya lebih besar dari 1, maka hubungan ini bersifat elastis, dengan asumsi ceteris paribus. Koefisien efektivitas PAD sebesar -3,25, menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam efektivitas PAD diperkirakan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25%, dengan asumsi ceteris paribus. Hubungan negatif ini mencerminkan bahwa peningkatan PAD belum mendorong pertumbuhan, karena ekonomi Sulawesi Tengah masih bergantung pada sektor pertambangan dan investasi besar, bukan pada kinerja PAD daerah. Koefisien efisiensi keuangan daerah sebesar -4,02 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam efisiensi keuangan daerah diperkirakan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,02%, dengan

asumsi ceteris paribus. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan lebih efisien, belanja daerah belum diarahkan optimal ke sektor-sektor produktif, sementara perekonomian masih didominasi sektor pertambangan yang minim bergantung pada belanja pemerintah daerah.

### 5. Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 9 Hasil Uji Layak Model (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.240	3	0.413	0.359	0.787 <sup>b</sup>
	Residual	4.608	4	1.152		
	Total	5.848	7			

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 9 diketahui nilai Fhitung sebesar 0,359 sedangkan nilai Ftabel sebesar 5,05 sehingga  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $0,359 < 5,05$ ) dengan signifikansi F sebesar 0,787 lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel kemandirian daerah (X1), Efektivitas PAD (X2), dan Efisiensi Keuangan Daerah (X3) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

## Pembahasan

### Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2016 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan daerah dilihat dari sisi varians pendapatan, desentralisasi fiskal, kemandirian, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis varians pendapatan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2019 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dari yang dianggarkan, yang berarti kinerja pendapatan daerah tersebut lebih buruk (unfavorable). Sementara pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022 dan 2023 pendapatan yang tercapai lebih besar dari yang dianggarkan yang menunjukkan kinerja yang lebih baik (favorable). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 hingga 2023 dapat dikatakan cukup baik meskipun terdapat fluktuasi antar tahun.

Kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis. Dari sisi efektivitas pendapatan, terdapat peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, 2017, dan 2019, realisasi pendapatan masih lebih rendah dari target anggaran, mencerminkan efektivitas yang belum optimal. Namun, mulai tahun 2018 hingga 2023, pendapatan yang terealisasi berhasil melampaui anggaran yang direncanakan, menandakan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2024). Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode tersebut mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 29,10%, yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih terbatas dan perlu ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, seperti sektor pertambangan (BPS Sulawesi Tengah, 2025).

Rasio kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah juga tergolong rendah, dengan rata-rata sebesar 41,79%. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mencerminkan keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan secara mandiri. Meskipun begitu, efektivitas PAD selama periode tersebut tergolong sangat baik dengan rata-rata 102,47%. Angka ini menunjukkan bahwa target PAD

telah ditetapkan secara realistis dan mampu dicapai melalui optimalisasi potensi yang ada. Namun demikian, tingkat efisiensi keuangan daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 93,13%. Inefisiensi ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, tingginya ketergantungan terhadap dana pusat, serta minimnya diversifikasi pendapatan daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan dari sisi efektivitas PAD, kinerja keuangan daerah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih menjadi kendala utama dalam upaya mendorong kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui penguatan sektor-sektor unggulan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara menyeluruh (BPKAD Sulawesi Tengah, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kemajuan, terutama dalam hal varians pendapatan dan efektivitas PAD, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengoptimalan sumber daya daerah serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Analisis kinerja keuangan daerah sangat penting untuk memahami seberapa efektif pemerintah daerah mengelola sumber daya mereka dan menerapkan kebijakan. Berbagai penelitian menyoroti pentingnya rasio keuangan, seperti kemandirian, efisiensi, dan efektivitas, dalam mengevaluasi kesehatan keuangan daerah. Metrik ini tidak hanya mencerminkan otonomi fiskal daerah tetapi juga kapasitas mereka untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan. Bagian berikut menyelidiki aspek-aspek kunci dari kinerja keuangan regional.

Rasio Keuangan dan Pentingnya Menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada sumber eksternal. Misalnya, rata-rata tingkat kemerdekaan Tana Toraja adalah 22% dari 2017-2019 (Ronal & Massua, 2023). Rasio Efisiensi untuk Mengukur seberapa baik suatu wilayah memanfaatkan sumber dayanya. Kabupaten Jombang melaporkan kinerja keuangan yang tidak stabil, namun mencapai target pendapatan melebihi harapan (Susanti et al., 2024). Rasio Efektivitas untuk Menilai keberhasilan upaya menghasilkan pendapatan. Di Tana Toraja, efektivitas pendapatan asli mencapai rata-rata 71% (Ronal & Massua, 2023)].

Dampak pada Tujuan Pembangunan diantaranya adalah Alokasi Belanja Modal yaitu Peningkatan kinerja keuangan secara positif mempengaruhi belanja modal, memungkinkan infrastruktur dan layanan yang lebih baik (Sitorus et al., 2023). Perencanaan dan Eksekusi Anggaran Manajemen keuangan yang efektif melalui perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Kinerja et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2016–2023 menunjukkan beberapa kemajuan, khususnya dalam hal efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong sangat efektif. Namun demikian, kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, efisiensi keuangan daerah juga belum optimal, yang mencerminkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya. Fluktuasi pada rasio desentralisasi fiskal mengindikasikan bahwa potensi daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek, kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus untuk meningkatkan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi fiskal melalui penguatan kebijakan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator krusial dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya publik serta sejauh mana kebijakan fiskal diimplementasikan secara efisien dan berorientasi pada hasil. Penggunaan indikator rasio keuangan seperti rasio kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan efisiensi belanja daerah lazim digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri, mencapai target pendapatan, serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Secara teoritis, kinerja keuangan yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, sebagaimana dijelaskan dalam teori alokasi fiskal optimal.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja keuangan daerah tersebut yaitu rasio kemandirian fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016–2023. Hasil estimasi regresi log-log menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal memiliki koefisien elastisitas positif sebesar 1,86, sedangkan efektivitas PAD dan efisiensi belanja daerah menunjukkan elastisitas negatif masing-masing sebesar -3,25 dan -4,02. Meskipun koefisien elastisitas ini tergolong tinggi, nilai signifikansi (*p*-value) dari ketiganya berada di atas ambang batas 0,05, sehingga tidak dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif *resource curse* sebagaimana dikemukakan oleh Auty (1993), yang menyatakan bahwa wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertambangan, justru cenderung mengalami hambatan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor ekstraktif yang seringkali tidak terintegrasi secara optimal dengan sektor ekonomi lainnya, serta pengaruh besar dari dinamika investasi swasta dan fluktuasi harga komoditas global. Kondisi ini juga tampak di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sektor pertambangan berperan besar namun keterkaitannya dengan belanja pemerintah daerah dan pengelolaan fiskal masih terbatas. Akibatnya, peningkatan dalam indikator-indikator keuangan daerah tidak serta-merta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Kartika, 2023; Rahma et al., 2021).

Lebih lanjut, temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal di tingkat daerah sangat bergantung pada tingkat kemandirian fiskal. Ketika daerah belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri, maka ruang fiskal yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sempit. Oleh karena itu, peran strategis pemerintah daerah dalam penguatan kinerja fiskal harus disertai dengan upaya diversifikasi ekonomi, pengurangan ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Amanda, 2024).

Hubungan antara kinerja keuangan regional dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan bervariasi di berbagai wilayah. Studi menunjukkan bahwa sementara metrik kinerja keuangan tertentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, efeknya tidak signifikan secara seragam. Bagian berikut menguraikan temuan utama dari penelitian terbaru. Di Sidoarjo, rasio kemerdekaan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai *p* 0,000, menunjukkan korelasi yang kuat (Sevigo & Lathifah, 2024).

Rasio Efektivitas Pendapatan Di Provinsi Jambi, rasio ini ditemukan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio kemerdekaan tidak (Simarmata et al., 2024). Pengaruh Keseluruhan Di Jawa Tengah, kinerja keuangan daerah hanya menyumbang 2,13% dari pertumbuhan ekonomi pra-COVID-19, meningkat menjadi 8,98% selama pandemi, menunjukkan dampak yang bervariasi dari waktu ke waktu (Komaedi et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara kinerja keuangan regional dan kemiskinan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat mempengaruhi kemiskinan secara langsung tanpa mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai perantara (Rusmita et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi terbukti memediasi pengaruh belanja modal pada IPM tetapi bukan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa metrik keuangan mungkin memiliki implikasi langsung terhadap kualitas hidup tanpa harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Susila, 2024).

Sementara kinerja keuangan regional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat dan sifat hubungan ini dapat berbeda secara signifikan berdasarkan konteks lokal dan metrik keuangan tertentu. Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin tidak selalu berfungsi sebagai mediator yang dapat diandalkan untuk efek kinerja keuangan pada hasil sosial ekonomi yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016, 2017, dan 2019 belum efektif karena realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Namun, sejak tahun 2018 hingga 2023, pendapatan daerah menunjukkan efektivitas yang lebih baik, dengan realisasi yang melampaui target anggaran. Rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode 2016–2023 menunjukkan angka fluktuatif dengan rata-rata 29,10 persen yang tergolong sedang, mencerminkan bahwa potensi kemandirian fiskal daerah masih belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam pengelolaan sektor pertambangan. Selain itu, rasio kemandirian fiskal yang rata-rata hanya sebesar 41,79 persen menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan keterbatasan kemampuan pembiayaan secara mandiri. Di sisi lain, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat efektif, dengan rata-rata 102,47 persen, yang menandakan bahwa target PAD telah ditetapkan secara realistis dan mampu dimobilisasi dengan baik. Meskipun demikian, efisiensi keuangan daerah selama delapan tahun terakhir masih tergolong rendah, dengan rata-rata rasio 93,13 persen, disebabkan oleh pengelolaan sumber daya yang belum optimal, ketergantungan pada dana pusat, dan kurangnya diversifikasi pendapatan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah yang ditinjau dari aspek kemandirian, efektivitas, dan efisiensi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena PAD belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dan pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

## REFERENSI

- Amanda, L. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2008–2020. Skripsi, Universitas Malikussaleh. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7969/>
- Auty, R.M. (1993). *Sustaining Development In Mineral Economies: The Resorce Curse*. Thesis. Routledge: London
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2025). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2023*. Diakses dari
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). *Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022*.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, (1991), *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kartika, Y. (2023). Kinerja Keuangan Daerah: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, dan Share and Growth. *Jurnal FAIR: Financial & Accounting Indonesian Research*, 3(2), 110–119. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v3i2.5559>

- Komaedi, K., Prabowo, H., Akbar, B., Daraba, D., Ilham, Muh., Mansyur, M., Averus, A., & Madjid, U. (2024). The Influence Of Regional Financial Performance On Economic Growth In Central Java Province. Eduvest. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1326>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. YKPN:Yogyakarta.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oates, W.E., (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development National.
- Peraturan Pemerintah Pasal 26 Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- Ulum, I. (2012). Audit Sektor Publik. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas di Ponegoro: Semarang.
- Oates, W.E., (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development National.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Priskila, E., & Hukom, A. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Melalui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2(2), 173-183.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 21(2), 148–163. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.12345>
- Ronal, M., & Massua, A. A. (2023). Analisis kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten tana toraja. 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.63>
- Rusmita, S., & Putra, W. (2024). Tracking the Trail of Regional Financial Performance: Economic Growth as a Bridge towards Poverty Reduction. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 07(10). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-21>
- Sevigo, A. E., & Lathifah, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 4(3), 715–724. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>
- Simarmata, A. N. Y., Achmad, E., & Bahri, Z. (2024). Comparative Study and Regional Financial Performance and Its Effect on The Economic Growth of Districts/Cities in Jambi Province. Deleted Journal, 5(1). <https://doi.org/10.61688/ajpbs.v5i1.312>
- Sitorus, M. I., Harahap, I., & Harahap, R. D. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi, 2(1), 181–197. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i1.1087>
- Sutrisno, E. (2019). Desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45-60
- Susanti, H., Budiono, A., & Supriadi, S. (2024). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014 – 2018 (Studi Kasus Di Pemda Kabupaten Jombang). 1(2), 96–115. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i2.223>
- Susila, M. R. (2024). Peranan pertumbuhan ekonomi dalam memediasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Journal of Business and Banking, 13(2), 287–304. <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.4458>